

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pendidikan merupakan bagian mendasar dari upaya mempersiapkan generasi muda untuk mampu menjalani dan bertahan menghadapi persaingan hidup kini dan masa mendatang. Sehingga di mana pun seorang siswa tinggal, pendidikan harus selalu memperlengkapi mereka untuk dunia yang dihadapi ketika mereka beranjak dewasa. Namun tugas mempersiapkan siswa untuk masa depan mereka menjadi semakin sulit ketika dunia pada kenyataannya berubah ke arah yang belum pernah terjadi sebelumnya, dimana wujud masa depan itu semakin sulit untuk didefinisikan. Oleh karenanya, laju perubahan yang cepat ini menimbulkan pertanyaan baru bagi pemerintah, sekolah, dan organisasi pendidikan.

Tantangan globalisasi, revolusi industri 4.0 dan *disruption period* yang sedang berlangsung dan cenderung semakin berat serta tidak menentu di masa mendatang, mengharuskan sekolah menjadi garda terdepan dalam membentuk generasi baru yang siap secara mental, fisik dan kompetensi.

Globalisasi menghadirkan besarnya ukuran, intensitas, kecepatan dan dampak dari jaringan, aliran, dan interaksi global, sehingga memaksa semua negara untuk mengkaji kembali hubungan pendidikan dengan politik, ekonomi, masyarakat dan budaya, melalui suatu pembentukan teknologi yang didasarkan pada informasi dan sistem telekomunikasi yang memfasilitasi proses-proses tersebut serta menciptakan konteks baru dimana pendidikan yang individual akan terjadi di masa depan. Globalisasi berarti saling terhubung di seluruh dunia, menghasilkan fenomena yang digambarkan oleh berbagai penulis sebagai percepatan saling ketergantungan, hilangnya jarak, terjadinya kompresi ruang-waktu, dan lingkungan yang beroperasi secara *real-time* dalam skala mendunia. (Brunner, 2001)

Selanjutnya, revolusi industri 4.0 merupakan kerangka kerja baru untuk manufaktur mutakhir yang sedang dipromosikan di Jerman serta semakin banyak diadopsi oleh negara lain. Kerangka kerja ini merupakan penggabungan teknologi

digital dan fisik pada seluruh rantai nilai produk dalam upaya untuk mengubah produksi barang dan jasa. Revolusi ini merupakan pendekatan yang berfokus pada

menggabungkan teknologi seperti manufaktur tambahan, otomatisasi, layanan digital dan *Internet of Things*, dan merupakan bagian dari gerakan yang berkembang menuju pemanfaatan konvergensi antara berbagai teknologi yang muncul. Konvergensi teknologi ini kemudian disebut sebagai revolusi industri 4.0, sebagaimana pendahulunya menjanjikan perubahan cara hidup dan lingkungan tempat kita hidup. Tidak ada kesepakatan universal tentang revolusi industri, namun para penyokong revolusi industri keempat berpendapat bahwa revolusi pertama melibatkan pemanfaatan tenaga uap untuk memekanisasi produksi; revolusi kedua, penggunaan listrik dalam produksi massal; dan revolusi ketiga, penggunaan elektronik dan teknologi informasi untuk mengotomatisasi produksi (Maynard, 2015).

Globalisasi dan revolusi industri 4.0 memberikan warna tersendiri bagi arah pencapaian tujuan pendidikan warga dunia, termasuk atmosfer pendidikan Indonesia yang mana keduanya berperan sebagai pemicu utama *fenomena disruptif* yang sudah mulai mengimbas dunia pendidikan. Teknologi *disruptive*, sebagai suatu istilah yang berasal dari karya Christensen (1997) menulis tentang teknologi *disruptive* sebagai pendorong praktik baru dalam industri barang dan jasa yang menggunakannya. Gangguan (disrupsi) tersebut bukan fitur desain dari teknologi, tetapi muncul dari pekerjaan yang pengguna dapatkan dari teknologi. Salah satu aspek yang paling signifikan dari teknologi yang mengganggu adalah bahwa, meskipun mereka sering mulai dengan sejumlah kecil pengguna, namun mereka tumbuh seiring waktu sampai mereka menggeser teknologi yang sebelumnya dominan, yaitu teknologi yang sudah ada. Teknologi yang mengganggu menciptakan kemungkinan baru; pengguna dapat melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dapat mereka lakukan. Misalnya, Wikipedia membuat pengetahuan tersedia secara instan untuk siapa saja dengan perangkat jaringan; pengguna tidak perlu membeli ensiklopedi tercetak, juga tidak membawanya. Wikipedia dengan demikian telah mengacaukan dan mengubah cara pengetahuan didistribusikan, dan, terlebih lagi, telah mengubah cara pengetahuan diproduksi. Christensen et al. (2008) menerapkan teori disrupsi pada sistem sekolah di AS, dengan alasan bahwa sekolah menerapkan teknologi telah mengikuti jalur inovasi

berkelanjutan, alih-alih mendorong pemikiran mendasar tentang pembelajaran dan pengajaran (Flavin, 2016).

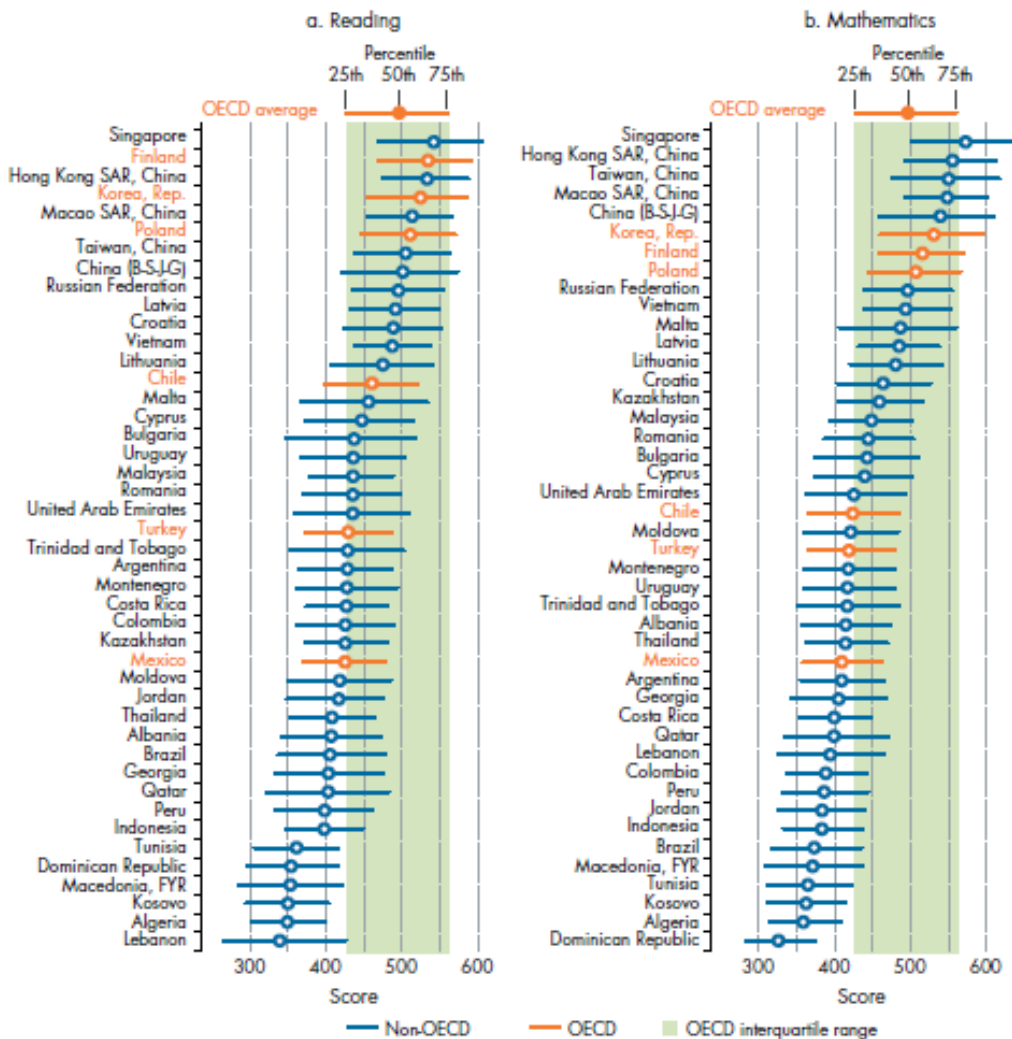
Merespon fenomena disrupsi di atas, maka perlu suatu mindset yang mampu merespon perubahan berkecepatan eksponensial dengan karakter 3S, yaitu *speed*, *surprises*, dan *sudden shift*. *Speed* dalam arti bahwa perubahan pada era ini bergerak begitu cepat karena didukung oleh teknologi. Validitas suatu informasi juga dengan cepat diketahui kebenarannya. *Surprises* dalam arti bahwa perubahan abad ini juga menimbulkan banyak kejutan akibat banyak hal baru yang tak terduga dan menimbulkan dampak yang luar biasa. *Sudden shift* dalam arti bahwa banyak hal yang mengalami pergeseran tiba-tiba, bukan menghilang (Kasali, 2018). *Mindset* di atas tentu haruslah diadaptasi di dunia pendidikan. *Mindset* adalah bagaimana manusia berpikir yang ditentukan oleh *setting* yang kita buat sebelum berpikir dan bertindak. *Mindset* yang diperlukan adalah respon cepat, *real-time*, *follow-up*, mencari jalan, mengendus informasi dan kebenaran, penyelesaian parallel, dukungan teknologi informasi, 24 jam sehari, 7 hari seminggu dan *connected* (terhubung) (Kasali, 2018). Sehingga sangat relevan jika pendidikan masa kini haruslah mengadopsi dan mengadaptasi lima jenis pembelajaran dasar untuk menghadapi abad ke-21 yaitu *learning to know*, *learning to do*, *learning to be*, *learning to live together* dan *learning to transform oneself and society*.

1.1.1 Isu Global Tentang Mutu Pendidikan

Pada forum pendidikan dunia yang diselenggarakan di Incheon Korea Selatan, dinyatakan bahwa visi UNESCO adalah mengubah kehidupan melalui pendidikan serta mengutamakan peran penting pendidikan sebagai pendorong utama pembangunan dan dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang telah ditetapkan. Lebih jauh, UNESCO berkomitmen dengan rasa urgensi terhadap agenda pendidikan yang diperbarui secara holistik, ambisius, dan aspiratif, tanpa mengabaikan siapa pun. (UNESCO, 2015)

Namun potret pendidikan saat ini, jika mengamati penilaian PISA (*The Programme for International Student Assessment*) yang disajikan sebagai berikut :

Performance of 25th, 50th, and 75th percentiles in 2015 PISA assessment, participating non-OECD economies and selected OECD economies



Source: WDR 2018 team, using data from Programme for International Student Assessment (PISA) collected in 2015 (OECD 2016a). Data at http://bit.do/WDR2018-Fig_3-4.

Note: PISA 2015 defines baseline levels of proficiency at a score of 407 for reading and 420 for mathematics. China (B-S-J-G) = China (Beijing-Shanghai-Jiangsu-Guangdong).

Gambar 1.1 Hasil Penilaian PISA Terhadap Negara OECD dan non OECD

Menurut penilaian internasional yang terkemuka tentang melek huruf dan berhitung — *Progress in International Reading Literacy Study* (PIRLS) dan *Trends in International Mathematics and Science Study* (TIMSS) — menyatakan bahwa rata-rata siswa di negara berpenghasilan rendah

Dian Sudiana Raflan, 2019

Implementasi Penjaminan Mutu Internal Sekolah...

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

memiliki kinerja lebih buruk dibandingkan dengan 95 persen siswa di negara-negara berpenghasilan tinggi. Skor tes siswa kuartil atas siswa (persentil ke-75 dari distribusi peserta tes PISA) berada jauh di bawah kuartil bawah siswa (persentil ke-25) dari negara anggota *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD). (World Bank, 2018)

Terkait data PISA di atas, perjuangan harus dilakukan terkait beberapa kekurangan pada sistem pendidikan yaitu terkait satu atau lebih dari empat unsur utama tingkat sekolah dalam hal pembelajaran yaitu pelajar yang siap belajar, pengajaran yang efektif, input yang berfokus pada pembelajaran, dan manajemen dan tata kelola yang terampil untuk mensinergikan ketiga hal di atas. Sebagaimana digambarkan pada ilustrasi sebagai berikut:



Source: WDR 2018 team.

Gambar 1.2 Beberapa Kekurangan pada Sistem Pendidikan Negara Berkembang

Pertama, anak-anak sering tiba di sekolah tanpa persiapan untuk belajar, itupun jika mereka datang. Hal lainnya adalah *malnutrisi*, penyakit, investasi orangtua yang rendah, dan lingkungan yang keras terkait dengan kemiskinan yang merusak pembelajaran anak usia dini. *Kedua*, guru seringkali kurang memiliki keterampilan atau motivasi untuk berfungsi efektif, padahal guru adalah faktor terpenting yang mempengaruhi

pembelajaran di sekolah. *Ketiga*, input seringkali tidak sampai hingga ruang kelas sehingga mempengaruhi pembelajaran ketika siswa dan guru melakukan proses pembelajaran. Padahal, wacana dan pandangan publik seringkali mengkorelasikan antara masalah kualitas pendidikan dengan kesenjangan input. Mencurahkan sumber daya yang cukup untuk pendidikan sangatlah penting. Pada kenyataannya di beberapa negara, sumber daya yang ada belum sejalan dengan lonjakan besar jumlah pendaftar peserta didik. *Keempat*, manajemen dan tata kelola yang buruk sering merusak kualitas sekolah. Meskipun kepemimpinan sekolah yang efektif tidak serta merta meningkatkan pembelajaran siswa secara langsung. Namun jika hal itu dilakukan, secara tidak langsung meningkatkan kualitas pengajaran dan memastikan penggunaan sumber daya yang efektif. (World Bank, 2018)

1.1.2 Isu Nasional Tentang Mutu Pendidikan

Respon terhadap fenomena mutakhir ini tertuang dalam visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025, yaitu:

“Terciptanya manusia yang sehat, cerdas, produktif, dan berakhlak mulia dan masyarakat yang makin sejahtera dalam pembangunan yang berkelanjutan didorong oleh perekonomian yang makin maju, mandiri, dan merata di seluruh wilayah didukung oleh penyediaan infrastruktur yang memadai serta makin kokohnya kesatuan dan persatuan bangsa yang dijiwai oleh karakter yang tangguh dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diselenggarakan dengan demokrasi [yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila] sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta menjunjung tegaknya supremasi hukum.” (hlm. 17)

Lebih spesifik lagi, Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005–2025 menyatakan bahwa visi 2025 adalah “Menghasilkan Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif (Insan Kamil/Insan Paripurna)” (hlm. 32). Makna insan Indonesia cerdas adalah insan yang cerdas secara komprehensif, yaitu cerdas spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan kinestetik. Selanjutnya dengan mengacu kepada Nawacita dan

memperhatikan Visi 2025, serta integrasi pembangunan pendidikan dan kebudayaan, ditetapkan Visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2019 yaitu “Terbentuknya Insan serta Ekosistem Pendidikan dan Kebudayaan yang Berkarakter dengan Berlandaskan Gotong Royong” (hlm. 33).

Seiring berjalannya waktu dan kecenderungan global sebagaimana tertuang dalam konsideran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan bahwa Negara Indonesia merupakan salah satu negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berperan aktif dalam penentuan sasaran Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebagaimana tertuang dalam dokumen *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*; bahwa untuk memenuhi komitmen pemerintah dalam pelaksanaan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals*, perlu adanya penyelarasan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional; pemerintah berupaya merespon tujuan global terkait yaitu menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua yang termanifestasikan dalam sasaran globalnya yaitu pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif. Hal ini beririsan dengan Sasaran Nasional RPJMN 2015-2019, yaitu diantaranya:

1. Meningkatnya persentase SD/MI berakreditasi minimal B pada tahun 2019 menjadi 84,2% (2015:68,7%).
2. Meningkatnya persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B pada tahun 2019 menjadi 81% (2015:62,5%).
3. Meningkatnya persentase SMA/MA berakreditasi minimal B pada tahun 2019 menjadi 84,6% (2015:73,5%).

4. Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat pada tahun 2019 menjadi 114,09% (2015: 108%).
5. Meningkatnya APK SMP/MTs/ sederajat pada tahun 2019 menjadi 106,94% (2015: 100,7%)
6. Meningkatnya APK SMA/SMK/MA/ sederajat pada tahun 2019 menjadi 91,63% (2015: 76,4%).
7. Meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun pada tahun 2019 menjadi 8,8 tahun (2015: 8,25 tahun).

Mengamati rangkaian visi, misi dan regulasi yang telah disusun sedemikian rupa serta data yang disajikan dalam lampiran Perpres di atas, maka sungguh masih senjang antara harapan dengan realitas yang terjadi dalam dunia pendidikan di Indonesia secara umum saat ini. Jika sasaran nasional terkait kualitas sekolah tingkat dasar dan menengah hingga tahun 2019 tercapai, maka baru sekitar 80% sekolah di Indonesia masih terakreditasi B untuk semua tingkatan. Makna kompetitif dari nilai akreditasi B belum mampu menjawab tantangan dan tuntutan kualitas SDM saat ini. Maka tuntutan terhadap peningkatan mutu pendidikan semakin tinggi dan pemenuhannya semakin mendesak.

Dalam kerangka pemenuhan tuntutan di atas, maka pada tingkat satuan pendidikan pemerintah menetapkan Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

1. **Lulusan** yang cerdas komprehensif.
2. **Kurikulum** yang dinamis sesuai kebutuhan zaman.
3. **Proses pembelajaran** yang berorientasi pada siswa dan mengembangkan kreatifitas siswa.
4. Proses pembelajaran dilengkapi dengan **sistem penilaian dan evaluasi pendidikan** yang andal, sah, dan memenuhi prinsip-prinsip penilaian.
5. **Guru dan tenaga kependidikan** yang profesional, berpengalaman dan dapat menjadi teladan.
6. **Sarana dan prasarana** yang digunakan lengkap dan sesuai dengan kearifan lokal.

7. **Sistem manajemen** yang akurat dan handal.
8. **Pembiayaan** pendidikan yang efektif dan efisien. (Sani, 2015)

Salah satu cara yang harus dilaksanakan untuk pemenuhan SNP yang dicanangkan pemerintah adalah peningkatan mutu pendidikan yang dilandasi dengan kegiatan penjaminan mutu yang dapat dipercaya. Beberapa kondisi yang harus dipenuhi oleh sekolah dalam menerapkan penjaminan mutu pendidikan adalah sebagai berikut:

1. Menjadikan mutu sebagai fokus utama.
2. Melakukan perubahan *mind set* dalam melayani pendidikan.
3. Menerapkan perubahan paradigma dalam manajemen sekolah atau madrasah.
4. Memastikan setiap komponen dalam pendidikan berfungsi melaksanakan pembelajaran yang bermutu.
5. Implementasi sistem penjaminan mutu secara terpadu, konsisten, dan berkelanjutan. (Sani, 2015)

1.1.3 Isu Mutu Pendidikan di Provinsi Jawa Barat Khususnya di Kabupaten Sukabumi

Provinsi Jawa Barat dengan luas wilayah 35.377,76 km² serta jumlah penduduk 48.037.827 jiwa (data BPS tahun 2018) dengan kepadatan penduduk 1.358 jiwa per km² merupakan provinsi terpadat di Indonesia, menunjukkan kepedulian dan komitmen yang tinggi terkait mutu pendidikan di Jawa Barat terlihat dari kenaikan anggaran pendidikan dari Rp1,7 triliun tahun 2016 menjadi Rp1,9 triliun pada tahun 2017. Anggaran tersebut salah satu wujudnya seperti program bantuan pembangunan RKB (Ruang Kelas Baru) guna meningkatkan angka partisipasi kasar sekolah menengah, program BPMU (Bantuan Pendidikan Menengah Umum), serta program sejenis BOS (Bantuan Operasional Sekolah) yang membantu operasional sekolah sehingga sekolah dapat memenuhi standar nasional pendidikan yang diamanatkan oleh undang-undang.

Adapun data kuantitatif terkait penyelenggaraan pendidikan di provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut :

Jenjang	Jumlah	APK			APM		
		2016	2017	2018	2016	2017	2018
SD/MI	23.734	106,4	106,89	103,54	93,73	93,03	91,94
SMP/MTs	8.293	99,96	100,93	99,27	77,87	78,49	76,65
SMA/MA	2.895	76,82	81,26	83,81	67,69	60,64	64,41
SMK	2.930	76,82	81,26	83,81	67,69	60,64	64,41

(sumber : <http://referensi.data.kemdikbud.go.id/index11.php> dan <http://apkapm.data.kemdikbud.go.id/>)

Tabel 1.1 APK dan APM Provinsi Jawa Barat

Secara umum, angka partisipasi kotor dan angka partisipasi murni untuk semua jenjang bersifat fluktuatif dari tahun 2016 hingga tahun 2018. Hal ini ditenggarai karena pertumbuhan industri di provinsi Jawa Barat yang tinggi yang tidak diimbangi dengan peningkatan mutu layanan pendidikan memicu fluktuasi APK dan APM secara signifikan.

Komitmen peningkatan mutu pendidikan di provinsi Jawa Barat, terlihat dalam misi pertama rencana strategik provinsi Jawa Barat yaitu :

“Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi” (hlm. V-1)

Selanjutnya tujuan tadi dipertajam lagi dalam bentuk misi 1 dan 2 pembangunan provinsi Jawa Barat, yaitu “Membentuk Manusia Pancasila Yang Bertaqwa Melalui Peningkatan Peran Masjid dan Tempat Ibadah Sebagai Pusat Peradaban dan Melahirkan Manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan Produktif Melalui Peningkatan Pelayanan Publik yang Inovatif” (hlm. V-2)

Demikian pula pemerintah Kabupaten Sukabumi yang memiliki visi : “Terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang Religius dan Mandiri” (hlm. V-2) yang dijabarkan dalam misi yang salah satunya adalah “Mewujudkan

Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan religius” (hlm. V-5). Bahwa keberhasilan suatu bangsa atau daerah sangat erat kaitannya dengan keunggulan sumber daya manusia. Melihat pengalaman di negara-negara yang telah maju termasuk di kawasan Asia memperlihatkan bahwa kualitas SDM yang dimiliki memungkinkan suatu bangsa atau daerah tersebut untuk mampu secara efisien menerapkan dan mengendalikan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan produktifitas tinggi.

Kebijakan untuk mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang mandiri dan berdaya saing berupa pengembangan pendidikan secara merata di Kabupaten Sukabumi baik pendidikan formal di sekolah maupun pendidikan informal di luar sekolah. Namun, sumber daya manusia yang mandiri dan berdaya saing tinggi saja tidak cukup dalam pembangunan daerah, karena diperlukan juga sumber daya manusia berakhlak mulia yang dapat membentuk identitas dan karakter manusia berkualitas. Oleh karena itu, pendidikan agama penting untuk dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari agar terbentuk karakter masyarakat Kabupaten Sukabumi yang selaras dengan perwujudan pembangunan daerah.

Kabupaten Sukabumi dengan luas 4.145,70 km² merupakan kabupaten terluas di provinsi Jawa Barat dengan jumlah penduduk 2.453.498 jiwa, memiliki data kuantitatif terkait penyelenggaraan pendidikan sebagai berikut:

Jenjang	Jumlah	APK			APM		
		2016	2017	2018	2016	2017	2018
SD/MI	1.558	106,27	106,82	101,83	96,74	96,01	93,74
SMP/MTs	635	96,10	88,88	87,33	76,03	77,77	76,77
SMA/MA	203	64,24	69,74	76,34	60,26	63,08	61,06
SMK	160	64,24	69,74	76,34	60,26	63,08	61,06

(sumber : <http://referensi.data.kemdikbud.go.id/index11.php> dan <http://apkpm.data.kemdikbud.go.id/>)

Tabel 1.2 APK dan APM Kabupaten Sukabumi

Data tabel 1.2 di atas menunjukkan bahwa APK dan APM di kabupaten Sukabumi memiliki *trend* yang fluktuatif. Hal ini mengindikasikan pula bahwa perkembangan dunia industri yang tidak diimbangi dengan peningkatan mutu pendidikan yang signifikan dalam rentang waktu tertentu mempengaruhi angka partisipasi pendidikan.

Mengelola 2556 satuan pendidikan, kabupaten Sukabumi berada pada peringkat 4 terbesar kabupaten pengelola satuan pendidikan di bawah kabupaten Bogor, Garut, dan Bandung. Sedangkan untuk tingkat SMA dan MA kabupaten Sukabumi mengelola 205 satuan pendidikan dengan program studi IPA sebanyak 73 satuan pendidikan, IPS sebanyak 166 satuan pendidikan, BAHASA sebanyak 5 satuan pendidikan dan KEAGAMAAN sebanyak 10 satuan pendidikan.

Menganalisa data hasil ujian nasional tahun pelajaran 2017/2018 di kabupaten Sukabumi yang disajikan dalam tabel berikut :

STATISTIK	Per Mata Pelajaran						Semua Mata Pelajaran
	BAHASA INDONESIA	BAHASA INGGRIS	MATEMATIKA	FISIKA	KIMIA	BIOLOGI	
Kategori	Cukup	Kurang	Kurang	Kurang	Kurang	Kurang	
Rata-Rata	65,63	47,60	33,69	39,26	46,66	47,30	48,20
Terendah	22,0	12,0	5,0	12,5	12,5	7,5	83,0
Tertinggi	94,0	92,0	95,0	97,5	92,5	97,5	358,0
Standar Deviasi	12,68	15,34	14,36	11,89	14,53	15,51	66,16

Sumber : <https://puspendik.kemdikbud.go.id/hasil-un/>

Tabel 1.3 Data Statistik Ujian Nasional IPA Kabupaten Sukabumi Tahun 2018

Secara umum, hasil ujian nasional tahun 2018 kabupaten Sukabumi untuk program studi IPA masih kurang dari standar yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, kecuali mata pelajaran bahasa Indonesia yang dianggap sudah cukup memenuhi standar yang diharapkan.

STATISTIK	Per Mata Pelajaran						Semua Mata Pelajaran
	BAHASA INDONESIA	BAHASA INGGRIS	MATEMATIKA	EKONOMI	SOSIOLOGI	GEOGRAFI	

Dian Sudiana Raflan, 2019

Implementasi Penjaminan Mutu Internal Sekolah...

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

Kategori	Cukup	Kurang	Kurang	Kurang	Kurang	Kurang	
Rata-Rata	56,70	38,50	29,75	43,11	51,43	47,82	43,62
Terendah	14,0	4,0	10,0	15,0	16,0	14,0	75,0
Tertinggi	92,0	94,0	87,5	87,5	92,0	98,0	344,0
Standar Deviasi	13,04	12,81	8,87	11,71	12,49	14,11	64,52

Sumber : <https://puspendik.kemdikbud.go.id/hasil-un/>

Tabel 1.4 Data Statistik Ujian Nasional IPS Kabupaten Sukabumi Tahun 2018

Demikian pula untuk program studi IPS, hasil ujian nasional tahun 2018 kabupaten Sukabumi untuk program studi IPS masih kurang dari standar yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, kecuali mata pelajaran bahasa Indonesia yang dianggap sudah cukup memenuhi standar yang diharapkan.

STATISTIK	Per Mata Pelajaran						Semua Mata Pelajaran
	BAHASA INDONESIA	BAHASA INGGRIS	MATEMATIKA	SASTRA INDONESIA	ANTROPOLOGI	BAHASA DAN SASTRA INDONESIA	
Kategori	Cukup	Kurang	Kurang	Cukup	Cukup	Baik Sekali	
Rata-Rata	60,08	48,97	32,43	69,26	60,65	86,86	53,46
Terendah	20,0	16,0	15,0	40,0	44,0	48,0	127,0
Tertinggi	88,0	80,0	77,5	87,5	82,0	100,0	320,0
Standar Deviasi	11,67	14,00	10,60	10,35	9,26	13,49	55,01

Sumber : <https://puspendik.kemdikbud.go.id/hasil-un/>

Tabel 1.5 Data Statistik Ujian Nasional BAHASA Kab. Sukabumi Tahun 2018

Sedangkan untuk program studi BAHASA, hasil ujian nasional tahun 2018 kabupaten Sukabumi menunjukkan hasil yang relatif mendekati standar yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, kecuali mata pelajaran Matematika dan Bahasa Inggris yang dianggap masih belum memenuhi standar yang diharapkan.

STATISTIK	Per Mata Pelajaran						Semua Mata Pelajaran
	BAHASA INDONESIA	BAHASA INGGRIS	MATEMATIKA	TAFSIR	HADIS	FIKIH	
Kategori	Cukup	Kurang	Kurang	Baik	Baik	Cukup	
Rata-Rata	62,57	45,00	34,29	73,83	76,29	55,08	52,91
Terendah	26,0	10,0	12,5	22,0	40,0	20,0	74,5
Tertinggi	92,0	90,0	97,5	100,0	94,0	80,0	349,5
Standar Deviasi	12,33	15,05	12,07	14,24	12,68	12,42	68,14

Sumber : <https://puspendik.kemdikbud.go.id/hasil-un/>

Tabel 1.6 Data Statistik UN KEAGAMAAN Kab. Sukabumi Tahun 2018

Untuk program studi KEAGAMAAN, hasil ujian nasional tahun 2018 kabupaten Sukabumi menunjukkan hasil yang relatif mendekati standar yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, kecuali mata pelajaran Matematika dan Bahasa Inggris yang dianggap masih belum memenuhi standar yang diharapkan.

Dian Sudiana Raflan, 2019

Implementasi Penjaminan Mutu Internal Sekolah...

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

Data di atas mengkonfirmasi masih adanya kesenjangan antara standar yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan output pengelolaan pendidikan di daerah, khususnya di kabupaten Sukabumi, terutama dalam pengelolaan dalam program studi IPA dan IPS. Fenomena ini menunjukkan bahwa sangat mendesak untuk aktualisasi penjaminan mutu internal sekolah, khususnya di kabupaten Sukabumi. Hal ini dilakukan untuk mereduksi berbagai kelemahan yang ada dalam dunia pendidikan Indonesia pada umumnya.

Selanjutnya, dengan mengambil sampel hasil ujian nasional di provinsi Jawa Barat, dimana untuk tingkat SMA dan MA berdasarkan data bersumber <https://puspendik.kemdikbud.go.id/hasil-un/>, dari 1621 SMA dan MA penyelenggara jurusan IPA (Ilmu Pengetahuan Alam) dengan mengambil 20 sekolah peringkat teratas berdasarkan nilai ujian nasional adalah sebagai berikut :

No.	Nama Sekolah	Status	Jumlah Peserta	2017		2016		2015	
				Rerata IPA	UNBK	Rerata IPA	UNBK	Rerata IPA	UNBK
1	SMA KRISTEN 1 BPK PENABUR, KOTA BANDUNG	Swasta	227	83.11	UNBK	76.98	90.61	83.25	93.93
2	SMA KRISTEN PENABUR HARAPAN INDAH, KOTA BEKASI	Swasta	100	80.69	UNBK	73.1	78.1	82.78	76.58
3	SMA JOHN PAUL'S SCHOOL	Swasta	23	80.32	UNBK	75.24	80.72	73.82	86.42
4	SMA KATOLIK SANTO ALOYSIUS 2, KOTA BANDUNG	Swasta	54	80.31	UNBK	77.7	79.24	78.08	81.39
5	SMA KATOLIK SANTO ALOYSIUS 1, KOTA BANDUNG	Swasta	108	80.3	UNBK	74.75	92.11	80.48	93.63
6	SMA NEGERI 1 BOGOR, KOTA BOGOR	Negeri	257	80.24	UNBK	74.73	UNBK	80.74	92.33
7	SMA NEGERI 3 BANDUNG, KOTA BANDUNG	Negeri	338	78.86	UNBK	76.97	UNBK	82.93	93.17
8	SMA NEGERI 1 BEKASI, KOTA BEKASI	Negeri	362	78.81	UNBK	77.35	UNBK	81.55	69.7
9	SMA CAHAYA BANGSA CLASSICAL SCHOOL	Swasta	12	78.57	UNBK	67.98	UNBK	73.8	86.4
10	SMA INSAN CENDEKIA AL KAUSAR, KABUPATEN SUKABUMI	Swasta	35	78.46	UNBK	74.64	80.91	76.01	82.97
11	SMA KRISTEN 3 BINA BAKTI	Swasta	28	78.18	UNBK	68.85	81.05	69.45	84.72
12	SMA KRISTEN TRIMULIA, KOTA BANDUNG	Swasta	19	77.94	UNBK	56.97	79	68.43	84.44
13	SMA KRISTEN PENABUR KOTA WISATA	Swasta	86	77.77	UNBK	70.51	79.22	-	-
14	SMA SANTA ANGELA , KOTA BANDUNG	Swasta	150	77.76	UNBK	72.52	76.68	77.26	78.8
15	SMA PESANTREN UNGGUL AL BAYAN, KABUPATEN SUKABUMI	Swasta	80	77.55	UNBK	77.58	UNBK	71.91	81.86
16	SMA NEGERI 1 DEPOK	Negeri	239	77.28	UNBK	72.63	UNBK	79.79	UNBK
17	SMA NEGERI 3 BOGOR, KOTA BOGOR	Negeri	208	77.11	UNBK	76.27	UNBK	81.87	93.59
18	SMA DON BOSCO III CIKARANG SELATAN	Swasta	18	76.59	UNBK	68.72	82	74.81	84.11
19	SMA KRISTEN PENABUR SUMMARECON, KOTA BEKASI	Swasta	35	76.44	UNBK	67.79	82.56	-	-
20	SMA KRISTEN KALAM KUDUS, KOTA BANDUNG	Swasta	46	76.41	UNBK	63.06	81.71	72.09	81.3

Sumber : <https://puspendik.kemdikbud.go.id/hasil-un>

Tabel 1.7 Peringkat SMA/MA IPA Jawa Barat Berdasarkan Nilai Ujian Nasional 2017

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 20 peringkat teratas nilai ujian nasional sekolah menengah atas (SMA) dan Madrasah Aliyah (MA), hanya terdapat 2 SMA berbasis pesantren yang masuk dalam 20 besar terbaik se-

Jawa Barat, artinya hanya 10% SMA/MA jurusan IPA yang mampu bersaing dengan 25% SMA Negeri dan 65% SMA Swasta lainnya.

Jika disisir lebih jauh, dari 200 terbaik SMA dan MA terbaik berdasarkan nilai ujian nasional pada tahun 2017, maka hanya terdapat 24 SMA berbasis pesantren atau 12% yang mampu bersaing secara kualitas akademik, sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini.

No.	Nama Sekolah	Status	Jumlah		2017		2016		2015	
			Peserta	Rerata	IIUN	Rerata	IIUN	Rerata	IIUN	
										IPA
10	SMA INSAN CENDEKIA AL KAUSAR, KABUPATEN SUKABUMI	Swasta	35	78.46	UNBK	74.64	80.91	76.01	82.97	
15	SMA PESANTREN UNGGUL AL BAYAN, KABUPATEN SUKABUMI	Swasta	80	77.55	UNBK	77.58	UNBK	71.91	81.86	
27	SMA ISLAM TERPADU NURUL FIKRI, KOTA DEPOK	Swasta	68	74.86	UNBK	68.91	78.2	72.44	82.44	
43	SMA AL-KAHFI, KABUPATEN BOGOR	Swasta	123	72.69	UNBK	68.43	78.33	69.76	79.62	
47	SMA SULTHON AULIA BOARDING SCHOOL	Swasta	40	72.19	UNBK	70.07	UNBK	-	-	
49	SMA UNGGULAN AR-RAHMAN, KABUPATEN SUKABUMI	Swasta	44	72.01	UNBK	70.84	53.1	73.4	62.4	
92	MA DARUL MARHAMAH, KABUPATEN BOGOR	Swasta	19	68.15	UNBK	60.14	UNBK	60.4	80.2	
95	SMA IT AS-SYIFA BOARDING SCHOOL, KABUPATEN SUBANG	Swasta	99	68.09	UNBK	61.54	UNBK	70.57	80.48	
104	SMA DARUL QURAN, KABUPATEN BOGOR	Swasta	74	67.49	UNBK	51.13	80.79	51.54	82.1	
113	SMA ISLAM NURUL FIKRI BOARDING SCHOOL LEMBANG	Swasta	65	66.63	UNBK	54.75	UNBK	61.33	83.6	
116	MA HUSNUL KHOTIMAH, KABUPATEN KUNINGAN	Swasta	199	66.5	UNBK	65.8	78.6	68.9	79.73	
122	SMA AL-HUDA ARJASARI, KABUPATEN BANDUNG	Swasta	43	65.91	UNBK	65.5	71.19	65.04	67.99	
124	SMA IT UMMUL QURO, KOTA BOGOR	Swasta	61	65.76	UNBK	56.08	UNBK	65.1	83.81	
126	SMA IT THARIQ BIN ZIYAD TAMBUN SELATAN	Swasta	81	65.73	UNBK	56.8	80.46	71.93	79	
128	SMA DARUL HIKAM INTERNASIONAL	Swasta	31	65.68	UNBK	62.1	79.22	64.9	83.2	
131	SMA IT PESANTREN NURURRAHMAN, KOTA DEPOK	Swasta	31	65.3	UNBK	58.95	80.11	64.07	84.44	
146	SMA DAARUL QURAN	Swasta	13	64.32	UNBK	41.78	0	57.75	-	
147	SMA IT AL BINAA PEBAYURAN, KABUPATEN BEKASI	Swasta	133	64.28	UNBK	54.54	78.81	66.59	81.25	
155	SMA HAYATAN THAYYIBAH, KOTA SUKABUMI	Swasta	21	63.59	UNBK	65.26	UNBK	73.69	80.68	
169	SMA DARUSSALAM, KOTA BEKASI	Swasta	56	62.89	UNBK	60.07	72.86	63	80.52	
170	SMA IBNU HAJAR BOARDING SCHOOL	Swasta	31	62.83	UNBK	64.44	80.19	-	-	
175	SMA IT AL-MULTAZAM, KABUPATEN KUNINGAN	Swasta	105	62.66	UNBK	55.87	75.4	62.89	74.22	
176	SMA DARUL HIKAM, KOTA BANDUNG	Swasta	53	62.44	UNBK	59.64	UNBK	66.63	84.21	
196	SMA ISLAM AS-SYAFIYIAH, KABUPATEN SUKABUMI	Swasta	29	61.45	UNBK	61.27	60.49	70.97	68.2	

Sumber : <https://puspendik.kemdikbud.go.id/hasil-un>

Tabel 1.8 Peringkat SMA Pesantren IPA Jawa Barat Berdasarkan Nilai Ujian Nasional dari 200 SMA/MA Tahun 2017

Terkait uraian tentang mutu sekolah di atas, dengan merujuk pada <https://puspendik.kemdikbud.go.id/hasil-un> tentang rekapitulasi hasil ujian nasional tingkat SMA tahun 2015, 2016, dan 2017 yang menempatkan dua SMA yang berbasis pesantren yaitu SMA Insan Cendekia Al-Kautsar Kabupaten Sukabumi menduduki peringkat ke-10 dan SMA Pesantren Unggul Al Bayan Kabupaten Sukabumi menduduki peringkat ke-15 dari total 1621 SMA/MA se-provinsi Jawa Barat. Menariknya, kedua sekolah pesantren tersebut (yang kemudian lebih dikenal dengan istilah sekolah boarding) merupakan sekolah yang dibidani oleh BPPT (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi) yang merupakan lembaga pemerintah non-

Dian Sudiana Raflan, 2019

Implementasi Penjaminan Mutu Internal Sekolah...

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

kementrian yang berada di bawah koordinasi Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengkajian dan penerapan teknologi. Penyelenggara kedua sekolah berada di bawah yayasan yang berbeda, namun memiliki prestasi yang paralel. Pembeda yang mencolok adalah jumlah peserta didik SMA Pesantren Unggul Al Bayan lebih dari dua kali lipat dari SMA Insan Cendekia Al Kautsar, sehingga daya tarik untuk meneliti lebih dalam terkait penyelenggaraan sekolah pesantren yang berbasis sains terkait implementasi penjaminan mutu internal lebih condong kepada SMA Pesantren Unggul Al Bayan Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi. Selain karena cukup sejang dengan SMA sejenis yang berada di bawahnya, juga peringkat nilai ujian nasional di atas terkonfirmasi validitasnya dengan kualitas output lainnya yaitu prosentase keberlanjutan studi ke perguruan tinggi dengan mencapai 96% kelulusan diterima di perguruan tinggi negeri papan atas Indonesia, atau 77 siswa lolos menjadi mahasiswa PTN dari 80 peserta ujian nasional pada tahun 2017.

Adapun perbandingan hasil akreditasi SMA Pesantren Unggul Al Bayan tahun 2015 dengan beberapa sekolah di kabupaten Sukabumi dengan nilai akreditasi A pada variasi tahun 2016, 2107, dan 2018 adalah sebagai berikut:

Nama Sekolah	Akreditasi	Nilai Akhir
SMA Pesantren Unggul Al Bayan	A	98
SMAN 1 Cibadak	A	96,71
SMAN 1 Cikembar	A	94
SMAS Insan Cendekia Al Kautsar	A	95
SMA IT Adzkie	A	91

Sumber : <https://bansm.kemdikbud.go.id>

Tabel 1.9 Nilai Akreditasi Beberapa SMA di kabupaten Sukabumi

Dipandang dari sudut pengelolaan, sekolah boarding atau pesantren yang menyelenggarakan pendidikan formal, informal dan nonformal sekaligus, tentu mengemban tugas yang luar biasa berat. Bisa dikatakan tiga

kali lebih berat bebannya dibandingkan dengan sekolah penyelenggara pendidikan formal pada umumnya. Jika tidak dilengkapi suatu sistem penjaminan mutu internal serta eksternal adalah suatu hal yang jauh dari teori-teori penjaminan mutu dan manajemen mutu pendidikan. Sistem penjaminan mutu seperti apakah yang diterapkan di SMA Pesantren Unggul Kabupaten Sukabumi ini sehingga mampu menjaga kepercayaan kastemer (*customer trust*) dan prestasi akademik maupun non-akademik selama ini? Bagaimana pelaksanaan peningkatan mutu berkelanjutan dilakukan? Pertanyaan ini yang hendak dijawab dalam penelitian ini.

Melihat realitas dan tuntutan di atas, maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian implementasi penjaminan mutu internal sekolah di SMA Pesantren Unggul Al Bayan Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat.

1.2 Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada sekolah unggul atau sekolah efektif di era otonomi dari kajian implementasi penjaminan mutu internal sekolah, dengan judul “IMPLEMENTASI PENJAMINAN MUTU INTERNAL SEKOLAH (STUDI KASUS DI SMA PESANTREN UNGGUL AL BAYAN KABUPATEN SUKABUMI)”. Aspek-aspek yang menjadi fokus masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Proses penyusunan dan penetapan visi, misi dan tujuan SMA Pesantren Unggul Al Bayan.

Sekolah bermutu tentu tak lepas dari kekuatan visi, misi, dan tujuan yang telah disepakati oleh penyelenggaranya, karena menurut penelitian bahwa kalimat pernyataan visi dan misi disusun sekolah bermutu merupakan nilai-nilai luhur yang dianut oleh pendiri/pengagas lembaga tersebut sehingga dapat dimaknai dengan baik oleh seluruh warga sekolah. Visi, misi, dan tujuan sekolah saling terkait. Pencapaian visi dan misi sekolah merupakan makna pencapaian mutu sekolah. Mutu sekolah yang

diharapkan dinyatakan dalam pernyataan visi dan misi. (Sukaningtyas, 2017)

2. Langkah-langkah yang ditempuh SMA Pesantren Unggul Al Bayan Sukabumi dalam mengimplementasikan penjaminan mutu internal sekolah.

a. Pembentukan Tim Penjaminan Mutu Internal Sekolah

Tugas Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Sekolah :

- 1) Mengkoordinasikan pelaksanaan penjaminan mutu di tingkat satuan pendidikan
- 2) Melakukan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, dan supervisi terhadap pelaku pendidikan di satuan pendidikan dalam pengembangan penjaminan mutu pendidikan;
- 3) Melaksanakan pemetaan mutu pendidikan berdasarkan data mutu pendidikan di satuan pendidikan;
- 4) Melakukan monitoring dan evaluasi proses pelaksanaan pemenuhan mutu yang telah dilakukan; dan
- 5) Memberikan rekomendasi strategi peningkatan mutu berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.

b. Pemetaan Mutu Sekolah Sebagai *Baseline* di satuan pendidikan atau yang bisa disebut dengan Evaluasi Diri Sekolah (EDS) dilaksanakan oleh Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Sekolah. Pemetaan mutu pendidikan ini dilakukan untuk memotret tingkat pemenuhan standar nasional pendidikan oleh satuan pendidikan. Instrumen yang digunakan dikembangkan dengan mengacu pada 8 standar nasional pendidikan. Satuan pendidikan dapat menggunakan instrumen yang dikembangkan sendiri atau instrumen yang dikembangkan pihak lain seperti pemerintah maupun badan akreditasi. (Kemdikbud, 2016)

Evaluasi Diri Sekolah ini dilaksanakan dengan langkah-langkah (1) penyusunan instrumen, (2) pengumpulan data, (3) pengolahan dan analisis data, dan (4) pembuatan peta mutu. Luaran dari kegiatan ini adalah (1) peta capaian standar nasional pendidikan di satuan

pendidikan, sebagai *baseline*, (2) masalah-masalah yang dihadapi dan (3) rekomendasi perbaikannya. (Kemdikbud, 2016)

- c. **Penyusunan Rencana Peningkatan Mutu Internal** yang dilaksanakan dengan menggunakan peta mutu sebagai masukan utama, disamping dokumen kebijakan pemerintah seperti kurikulum dan standar nasional pendidikan, serta dokumen rencana strategis pengembangan sekolah. Luaran dari kegiatan perencanaan ini adalah Dokumen Perencanaan Pengembangan Sekolah dan Rencana Aksi. (Kemdikbud, 2016)
- d. **Pelaksanaan Rencana Peningkatan Mutu**, yaitu pemenuhan mutu yang dilaksanakan meliputi kegiatan pengelolaan satuan pendidikan dan kegiatan proses pembelajaran. Luaran dari kegiatan Pelaksanaan Rencana Peningkatan Mutu ini adalah terjadinya pemenuhan mutu pendidikan dan capaian SNP yang ditetapkan oleh satuan pendidikan. (Kemdikbud, 2016)
- e. **Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Peningkatan Mutu**, untuk memastikan bahwa pelaksanaan peningkatan mutu berjalan sesuai rencana yang telah disusun. Luaran dari kegiatan ini adalah laporan pelaksanaan pemenuhan standar nasional pendidikan dan implementasi rencana pemenuhan mutu oleh satuan pendidikan. Selain itu juga rekomendasi tindakan perbaikan jika ditemukan adanya penyimpangan dari rencana dalam pelaksanaan pemenuhan mutu ini. Dengan demikian ada jaminan kepastian terjadinya peningkatan mutu berkelanjutan. (Kemdikbud, 2016)

Siklus ini dikenal sebagai PDCA adalah singkatan dari *Plan, Do, Check* dan *Act* yaitu siklus peningkatan proses (*Process Improvement*) yang berkesinambungan atau secara terus menerus seperti lingkaran yang tidak ada akhirnya. Konsep siklus PDCA (*Plan, Do, Check* dan *Act*) ini pertama kali diperkenalkan oleh seorang ahli manajemen mutu dari Amerika Serikat yang bernama Dr. William Edwards Deming.

3. Continuous Quality Improvement (CQI) yang dilakukan di SMA Pesantren Unggul Al Bayan Sukabumi.

Continuous Quality Improvement adalah suatu pendekatan manajemen mutu yang merupakan evolusi usaha penjaminan mutu yang lebih memfokuskan pada proses yang berbasis pada data objektif dalam rangka menganalisa dan meningkatkan proses. CQI merupakan perangkat konsep, prinsip dan metode yang dikembangkan dari prinsip-prinsip mutu sebagaimana yang dikemukakan pada pakar mutu seperti Joseph Juran, Edward Deming, dan Philip Crosby serta pakar lainnya. Meskipun pada mulanya prinsip dan metode ini dikenal dalam dunia industri manufaktur namun kemudian banyak diterapkan dalam dunia kesehatan dan pendidikan.

- a. Faktor-faktor Penting Pendorong Mutu Sekolah**, yaitu berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, satuan pendidikan mengoleksi dan menganalisis data terkait faktor pendorong peningkatan mutu sekolah yang dituangkan dalam program peningkatan mutu.
- b. Penetapan Standar Mutu Baru**, yaitu berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, satuan pendidikan melakukan penetapan standar mutu baru yang lebih tinggi dari standar *baseline*. Untuk itu satuan pendidikan harus menyusun strategi peningkatan mutu.
- c. Penyusunan Strategi Peningkatan Mutu**, strategi ini diarahkan untuk mendorong satuan pendidikan dapat memenuhi standar nasional pendidikan. Jika satuan pendidikan telah memenuhi standar nasional pendidikan, satuan pendidikan dapat menetapkan standar baru di atas standar nasional pendidikan. (Kemdikbud, 2016)

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas dapat dirinci pertanyaan penelitian khusus berikut :

1. Bagaimana proses penyusunan dan penetapan visi, misi dan tujuan SMA Pesantren Unggul Al Bayan?

2. Bagaimana langkah-langkah yang ditempuh SMA Pesantren Unggul Al Bayan Sukabumi dalam mengimplementasikan penjaminan mutu internal sekolah?
 - a. Bagaimana proses pembentukan tim penjaminan mutu internal sekolah sebagai pelaksana penjaminan mutu internal sekolah?
 - b. Bagaimana pemetaan mutu sekolah sebagai *baseline* dilakukan?
 - c. Bagaimana penyusunan rencana peningkatan mutu internal dilakukan?
 - d. Bagaimana pelaksanaan rencana peningkatan mutu dalam upaya pemenuhan mutu dilakukan?
 - e. Bagaimana monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana peningkatan mutu dilakukan?
3. Bagaimana *Continuous Quality Improvement* (CQI) dilakukan di SMA Pesantren Unggul Al Bayan Sukabumi?
 - a. Faktor-faktor penting apa yang menjadi pendorong mutu sekolah?
 - b. Bagaimana penetapan standar mutu baru dilakukan?
 - c. Bagaimana penyusunan strategi peningkatan mutu dilakukan?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi mendalam dan gambaran utuh tentang implementasi penjaminan mutu internal di SMA Pesantren Unggul Al Bayan Cibadak Sukabumi.

Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk mengungkap informasi yang berkaitan dengan:

1. Proses penyusunan dan penetapan visi, misi dan tujuan SMA Pesantren Unggul Al Bayan.
2. Langkah-langkah yang ditempuh SMA Pesantren Unggul Al Bayan Sukabumi dalam mengimplementasikan penjaminan mutu internal sekolah, yaitu:
 - a. Tim penjaminan mutu internal sekolah sebagai pelaksana penjaminan mutu internal sekolah.
 - b. Pembuatan peta mutu sekolah sebagai *baseline*.

- c. Penyusunan rencana peningkatan mutu internal.
 - d. Pelaksanaan rencana peningkatan mutu dalam upaya pemenuhan mutu.
 - e. Kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana peningkatan mutu.
3. Pelaksanaan *Continuous Quality Improvement* di SMA Pesantren Unggul Al Bayan Sukabumi.
- a. Faktor-faktor penting pendorong mutu sekolah.
 - b. Penetapan standar mutu baru.
 - c. Penyusunan strategi peningkatan mutu.

1.5 Manfaat Penelitian

Nilai lebih atau kontribusi dari penelitian ini meliputi beberapa aspek yang diharapkan, yaitu:

1. Manfaat atau Signifikansi dari Segi Teori

Pada tataran teoretis hasil penelitian dari tesis ini diharapkan bermanfaat dalam hal:

- a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pembaruan pendekatan pendidikan sekolah berbasis pesantren yang terus berkembang sesuai dengan tuntutan masyarakat dan jaman.
- b. Memberikan sumbangan ilmiah dalam ilmu pendidikan menengah, yaitu implementasi penjaminan mutu internal sekolah berbasis pesantren yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
- c. Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan penjaminan mutu internal sekolah dalam pelaksanaan dan pengembangannya pada pendidikan menengah atas yang berbasis pesantren.

2. Manfaat atau Signifikansi dari Segi Kebijakan

Memberikan arahan kebijakan untuk pengembangan pendidikan bagi SMA berbasis pesantren terkait implementasi penjaminan mutu internal sekolah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

3. Manfaat atau Signifikansi dari Segi Praktik

Pada tataran praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai:

- a. Informasi bagi para kepala sekolah, pejabat gugus mutu internal sekolah, pengurus yayasan dan para pimpinan Lembaga Penjaminan Mutu terkait kebijakan penerapan penjaminan mutu internal sekolah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel di sekolah menengah berbasis pesantren.
- b. Bahan pertimbangan bagi para pejabat di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Agama Republik Indonesia khususnya terkait pentingnya kebijakan dan komitmen untuk mengembangkan mutu sekolah yang berbasis pesantren.

- c. Informasi bagi para pengamat dan konsultan bidang pendidikan terkait upaya-upaya memberikan dukungan ataupun saran terkait peningkatan mutu pendidikan menengah yang berbasis pesantren.
- d. Kerangka pemikiran awal khususnya bagi peneliti yang berkeinginan untuk melakukan kajian lebih mendalam terkait implementasi penjaminan mutu pada sekolah menengah berbasis pesantren. Informasi-informasi penting yang bisa diambil antara lain perlunya upaya yang matang untuk menerapkan penjaminan mutu internal, pentingnya langkah-langkah strategis yang didukung tim yang kuat, perlunya mekanisme kerja penjaminan mutu internal sekolah yang memenuhi kaidah PDCA (*Plan, Do, Check and Act*).

4. Manfaat atau Signifikansi dari Segi Isu serta Aksi Sosial

Memberikan informasi kepada semua pihak mengenai implementasi penjaminan mutu internal sekolah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel pada Sekolah Menengah Atas (SMA) berbasis pesantren, sehingga dapat menjadi bahan masukan untuk lembaga-lembaga formal sejenis dalam kerangka peningkatan mutu pendidikan di Indonesia.

1.6 Struktur Organisasi Tesis

Secara garis besar struktur organisasi penulisan laporan penelitian ini dibagi menjadi lima bagian atau bab, yang dimulai dari Bab I berisi Pendahuluan. Kemudian berturut-turut: Bab II berisi Kajian Pustaka, Bab III berisi Metode Penelitian, Bab IV tentang Hasil Penelitian dan Pembahasan, serta Bab V berisi Simpulan, Implikasi dan Rekomendasi.

Bab I Pendahuluan berisi beberapa sub bab, yaitu: Latar Belakang Penelitian; Fokus Penelitian; Rumusan Masalah; Tujuan Penelitian; Manfaat Penelitian; serta Struktur Organisasi Tesis.

Bab II Kajian Pustaka, terdiri dari sub bab: Konsep Sekolah Bermutu; Penjaminan Mutu Internal Pendidikan; Langkah-langkah Proses Penjaminan Mutu Pendidikan; *Continuous Quality Improvement*; Paradigma Penelitian.

Bab III Metode Penelitian terbagi menjadi sub bab: Desain Penelitian; Lokasi Penelitian; Jenis Data Penelitian; Sumber Data Penelitian; Teknik Pengumpulan Data; Teknik Analisis Data; dan Keabsahan Data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan terdiri dari sub bab: Hasil Penelitian; dan Pembahasan.

Bab V Simpulan, Implikasi dan Rekomendasi, terbagi menjadi sub bab: Simpulan; Implikasi dan Rekomendasi.